

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri atas dua bagian, pada bagian yang pertama akan diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian. Pada bagian selanjutnya akan dijelaskan mengenai saran atau implikasi kebijakan.

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat di tarik dari hasil analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi produk domestik regional bruto (PDRB) di Kabupaten Sleman Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mempunyai pengaruh terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di Kabupaten Sleman Yogyakarta.

Variabel Dana Perimbangan (DP) berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di Kabupaten Sleman. Apabila nilai Dana Perimbangan naik maka produk domestik regional bruto di Kabupaten Sleman akan mengalami peningkatan.

Selanjutnya, untuk variabel besarnya Tenaga Kerja (TK) berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di Kabupaten Sleman. Apabila nilai Tenaga Kerja naik maka produk domestik regional bruto di Kabupaten Sleman akan mengalami peningkatan.

Secara bersama-sama nilai Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Tenaga Kerja berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Sleman.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Sleman dalam meningkatkan sumber daya manusia juga sangat penting. Hal ini dikarenakan meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) akan menunjang pembangunan berbagai sektor yang menghasilkan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto. Oleh karena itu, pemerintah daerah juga harus menyediakan sarana pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia.
2. Pemerintah sebaiknya juga memperhatikan faktor mikroekonomi melalui kebijakan-kebijakan yang diambil yang selanjutnya untuk meningkatkan usaha usaha kecil menengah sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
3. Pemerintah daerah harus mempersiapkan diri dalam pembangunan yang independen, dan melakukan kebijakan yang dapat meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto agar tidak terlalu bergantung pada dana perimbangan yang dikucurkan pemerintah pusat.

5.3 Keterbatasan Penulisan

Berdasarkan uji yang telah dilakukan ternyata masih terdapat keterbatasan dalam penulisan, yaitu:

1. Terdapat penyakit autokorelasi dalam model dan perlu diperbaiki, walaupun data tersebut sudah dirubah dalam bentuk Log.
2. Terdapat penyakit heteroskedastisias dalam model dan perlu diperbaiki, walaupun data tersebut sudah dirubah dalam bentuk Log.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Deddy Supriyadi B dan Dadang S, 2001, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Gujarati, Damodar., 2003. *Basic Econometrics*. New York: McGraw-Hill.

Imam Ghazali, 2001, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Jogiyanto, H.M, 2004, *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman*, BPFE, Yogyakarta.

Lincoln Arsyad, 1999, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi ke-4 Bagian Penerbitan STIE YKPN, Yogyakarta.

Mardiasmo, 2004, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Penerbit Andi.

Sadono Sukirno, 2002, *Teori Ekonomi Mikro*, Penerbit CV Alfabeta, Bandung.

Siagian, Dergibson dan Sugiarto, 2000, *Statistik untuk Bisnis*, BPFE, Yogyakarta.

Sugiyono, 1997, *Statistika Untuk Penelitian*, Penerbit CV Alfabeta, Bandung.

Suparmoko, 1995, *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Suatu Pendekatan Teoritis*, Edisi II, BPFE, Yogyakarta.

B. Brosur/ Jurnal :

Sasana, Hadi & Achmad Hendra, 2003, *Laporan Hasil Penelitian: Pengaruh Hubungan Pemerintah Pusat - Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klaten*, Semarang.

Sularmi & Agus Endro Suwarno, 2006, *Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Menghadapi Otonomi Daerah Ditinjau dari Aspek Keuangan (Studi Empiris pada Wilayah Karesidenan Surakarta)*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Sumiyarti & Akhmad Fauzan, 2004, *Pengaruh Perimbangan Pusat Daerah Terhadap Perekonomian Kota Depok*, Media Ekonomi, LPFE Trisakti, Jakarta.

UU No 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

UU No 25 tahun 1994 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

www.bps.go.id, *Yogyakarta dalam Angka*, Yogyakarta, 2003.

www.pemda-diy.go.id

www.world-bank.co.id

www.djpk.depkeu.go.id